



Perang Tak Kasat Mata di Laut sebagai Tantangan Keamanan Maritim Indonesia

Baharudin Anwar

c

E-mail: baharudinanwar1995@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2026-03-07 Revised: 2026-04-13 Published: 2026-05-02	This article examines the challenges faced by Indonesia in securing its maritime security amidst increasingly complex hybrid threats in the era of globalization. As the world's largest archipelagic nation, strategically located in the Indo-Pacific region, Indonesia is vulnerable to non-conventional maritime threats involving various aspects such as military, economic, cyber, social, and informational dimensions. These threats do not only manifest as violations of territorial waters by foreign vessels or cyberattacks on port infrastructure, but also through the use of gray zone tactics by countries like China in the South China Sea and the Northern Natuna Sea. The research combines theoretical frameworks of non-traditional security and hybrid threats, along with geopolitical analysis relevant to Indonesia's situation. The analysis reveals vulnerabilities including institutional fragmentation, limited surveillance technology, dependence on global economy, and low awareness among coastal communities. Therefore, to address these threats, this article recommends a hybrid defense strategy involving institutional integration, proactive maritime diplomacy, strengthening maritime economy, and enhancing cyber security as crucial pillars in safeguarding Indonesia's maritime sovereignty. Indonesia's success in responding to these hybrid threats will determine its position as a global maritime power and the stability of the Indo-Pacific region.
Keywords: <i>Maritime Security;</i> <i>Hybrid Threats;</i> <i>Gray Zone Tactics;</i> <i>Cyber Security;</i> <i>Maritime Diplomacy.</i>	

Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2026-03-07 Direvisi: 2026-04-13 Dipublikasi: 2026-05-02	Artikel ini mengkaji tantangan yang dihadapi Indonesia dalam menjaga keamanan maritim di tengah ancaman hibrida yang semakin kompleks pada era globalisasi. Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan posisi strategis di kawasan Indo-Pasifik, memiliki kerentanan terhadap ancaman maritim non-konvensional yang mencakup berbagai aspek seperti militer, ekonomi, siber, sosial, dan informasi. Ancaman ini muncul tidak hanya dalam bentuk pelanggaran wilayah oleh kapal asing atau serangan siber terhadap infrastruktur pelabuhan, tetapi juga melalui penggunaan taktik abu-abu oleh negara-negara seperti Tiongkok di Laut Cina Selatan dan Laut Natuna Utara. Penelitian ini menggabungkan kerangka teoritis keamanan non-tradisional dan ancaman hibrida, serta analisis geopolitik yang relevan dengan kondisi Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa kerentanannya meliputi fragmentasi kelembagaan, keterbatasan teknologi pengawasan, ketergantungan pada ekonomi global, dan rendahnya kesadaran masyarakat pesisir. Oleh karena itu, untuk mengatasi ancaman tersebut, artikel ini merekomendasikan strategi pertahanan hibrida yang melibatkan integrasi lembaga, diplomasi maritim proaktif, penguatan ekonomi maritim, serta peningkatan keamanan siber sebagai pilar penting dalam menjaga kedaulatan laut Indonesia. Keberhasilan Indonesia dalam merespons ancaman hibrida ini akan sangat menentukan posisinya sebagai kekuatan maritim global dan stabilitas kawasan Indo-Pasifik.
Kata kunci: <i>Keamanan Maritim;</i> <i>Ancaman Hibrida;</i> <i>Taktik Abu-Abu;</i> <i>Keamanan Siber;</i> <i>Diplomasi Maritim.</i>	

I. PENDAHULUAN

Sejarah bangsa Indonesia tidak pernah dapat dipisahkan dari laut. Dengan lebih dari 17.566 pulau dan garis pantai sepanjang 81.000 kilometer, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Laut bukan hanya ruang pemisah, melainkan simpul pemersatu sekaligus jalur vital bagi keberlangsungan ekonomi, politik, dan keamanan nasional. Namun, justru karena posisinya yang strategis, laut Indonesia juga

menjadi ruang kompetisi global yang semakin kompleks.

Di era globalisasi, ancaman terhadap kedaulatan maritim tidak lagi bersifat konvensional. Ancaman militer terbuka, seperti agresi bersenjata, kini semakin jarang. Sebaliknya, ancaman yang muncul lebih sulit diidentifikasi, seringkali tak Kasat Mata, dan hadir dalam bentuk ancaman hibrida—yaitu perpaduan antara instrumen militer, politik, ekonomi,

teknologi, informasi, hingga operasi siber. Dalam konteks maritim, ancaman ini bisa berupa infiltrasi kapal asing di wilayah ZEE, operasi spionase terhadap infrastruktur pelabuhan, kampanye disinformasi terkait klaim wilayah, hingga penetrasi melalui instrumen ekonomi seperti investasi strategis di pelabuhan dan alur laut.

Sebagai contoh nyata, praktik gray zone tactics yang dilakukan Tiongkok di Laut Cina Selatan menunjukkan bagaimana sebuah negara dapat menggunakan taktik non-militer dengan mengerahkan kapal nelayan atau coast guard untuk secara perlahan menguasai wilayah yang dipersengketakan tanpa memicu perang terbuka. Fenomena serupa potensial terjadi di Laut Natuna Utara, wilayah kaya energi yang juga masuk dalam klaim sepihak Tiongkok melalui nine dash line yang sekarang berubah menjadi ten dash line. Dengan demikian, keamanan maritim Indonesia tidak bisa lagi dipandang semata dari perspektif militer, melainkan harus dilihat dalam spektrum ancaman hibrida yang melibatkan multidimensi.

Globalisasi turut memperparah kompleksitas ini. Jalur laut Indonesia adalah urat nadi perdagangan dunia, dengan lebih dari 90 ribu kapal melewati Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) setiap tahun. Kondisi ini membuat perairan Nusantara sekaligus menjadi peluang dan kerentanan. Peluang untuk membangun kekuatan maritim sebagai pusat ekonomi dunia, namun juga kerentanan karena menjadi titik rawan infiltrasi aktor negara maupun non-negara. Ancaman hibrida di laut dapat merugikan ekonomi, merusak stabilitas sosial, dan bahkan menggoyahkan legitimasi politik negara.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berbasis pada analisis kepustakaan (*literature review*) dan analisis geopolitik-strategis. Pendekatan ini dipilih karena isu yang diteliti berkaitan dengan ancaman hibrida di domain maritim, yang lebih tepat dipahami melalui kerangka konseptual, analisis kontekstual, dan pemetaan tren daripada sekadar data kuantitatif. Ancaman hibrida maritim bersifat multidimensi dan melibatkan berbagai instrumen yang saling terintegrasi, seperti operasi militer non-tradisional, serangan siber, politik internasional, dan ekonomi. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang

interaksi antar dimensi tersebut dan dampaknya terhadap keamanan maritim Indonesia.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Jenis Ancaman Hibrida di Laut Indonesia

Ancaman hibrida di laut Indonesia merupakan kombinasi dari ancaman militer dan non-militer yang secara bersamaan menggerus kedaulatan dan stabilitas negara. Ancaman ini sulit diidentifikasi dengan jelas karena hadir secara perlahan dan sering kali tidak memicu konflik terbuka. Beberapa jenis ancaman hibrida yang ditemukan dalam penelitian ini meliputi:

1. Gray Zone Tactics oleh Kapal Asing

Kapal nelayan asing, khususnya dari Tiongkok dan Vietnam, sering kali memasuki wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Natuna Utara. Kehadiran kapal-kapal ini sering kali dikawal oleh kapal coast guard yang membuatnya sulit untuk diproses secara hukum. Ancaman ini muncul sebagai taktik abu-abu (*gray zone*), di mana tidak ada agresi militer terbuka, namun secara perlahan, kawasan tersebut terkikis. Hal ini menyebabkan Indonesia berada dalam dilema antara merespons dengan kekuatan militer yang berisiko eskalasi, atau membiarkan pelanggaran tersebut yang dapat merusak kedaulatan.

2. Cyber Warfare terhadap Infrastruktur Maritim

Serangan siber menjadi ancaman yang semakin signifikan di sektor maritim. Misalnya, serangan ransomware yang terjadi pada sistem pelabuhan Maersk pada 2017 menunjukkan betapa rentannya infrastruktur maritim terhadap gangguan digital. Indonesia yang sedang mengembangkan pelabuhan modern di berbagai titik, seperti Tanjung Priok dan Makassar New Port, berisiko besar terhadap serangan yang dapat melumpuhkan logistik nasional dan perekonomian.

3. Kejahatan Transnasional Terorganisasi

Kejahatan transnasional seperti penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, dan illegal fishing terus meningkat di perairan Indonesia. Menurut data, lebih dari 70% narkoba yang masuk ke Indonesia melalui jalur laut. Selain itu, praktik illegal fishing yang dilakukan oleh kapal asing merugikan ekonomi Indonesia hingga mencapai kerugian sekitar Rp 30

triliun per tahun. Kejahatan-kejahatan ini berkontribusi pada ketidakstabilan ekonomi dan sosial serta merusak sumber daya alam Indonesia.

4. Coercive Economic Diplomacy

Investasi asing di sektor maritim, seperti pembangunan pelabuhan, sering digunakan sebagai instrumen tekanan politik. Fenomena ini dapat dilihat pada negara-negara yang menggunakan "debt trap diplomacy," seperti yang terjadi di Sri Lanka dengan Pelabuhan Hambantota. Indonesia harus berhati-hati agar tidak terjatuh dalam ketergantungan yang merugikan, yang dapat mengurangi kedaulatan ekonomi.

5. Information Warfare dan Propaganda

Informasi yang tersebar melalui media sosial dan laporan internasional sering kali digunakan untuk membentuk opini publik terkait klaim wilayah maritim, seperti klaim sepihak Tiongkok atas Laut Cina Selatan. Kampanye disinformasi dapat merusak legitimasi klaim Indonesia dan memperburuk hubungan diplomatik dengan negara lain. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk membangun diplomasi maritim yang kuat untuk menangani propaganda yang merugikan.

B. Kerentanan Indonesia

Indonesia menghadapi sejumlah kerentanan yang memperburuk dampak dari ancaman hibrida di laut. Kerentanan tersebut antara lain:

1. Fragmentasi Kelembagaan

Dalam merespons ancaman maritim, Indonesia menghadapi tantangan koordinasi antara berbagai instansi, seperti TNI AL, Bakamla, KKP, Bea Cukai, dan Polair. Fragmentasi kewenangan ini seringkali menyebabkan respons terhadap ancaman menjadi lambat atau tumpang tindih. Misalnya, ketika kapal asing terlibat dalam illegal fishing, terjadi perdebatan tentang siapa yang memiliki kewenangan untuk menindak: apakah TNI AL dengan pendekatan militer atau KKP dengan pendekatan hukum perikanan.

2. Keterbatasan Teknologi dan Armada

Teknologi pengawasan Indonesia masih terbatas. Sistem radar dan satelit yang digunakan untuk memantau perairan Indonesia masih belum mencakup seluruh 81.000 kilometer garis pantai. Selain itu,

jumlah kapal patroli yang dimiliki Indonesia sangat terbatas, yang membuat pengawasan sering kali bergantung pada laporan nelayan. Keterbatasan ini membuat Indonesia sangat rentan terhadap pelanggaran oleh kapal asing atau kejahatan transnasional yang sulit terdeteksi.

3. Rendahnya Kesadaran Masyarakat Pesisir

Masyarakat pesisir, terutama nelayan, sering kali tidak menyadari bahwa mereka berada di garis depan pertahanan negara. Minimnya edukasi dan pemahaman terhadap pentingnya peran mereka dalam menjaga kedaulatan laut membuat mereka rentan dimanfaatkan oleh kelompok kriminal atau negara asing. Hal ini semakin memperburuk kerentanannya terhadap ancaman hibrida.

4. Ketergantungan Ekonomi Global

Indonesia, sebagai negara yang bergantung pada ekspor-impor melalui jalur laut, berada dalam posisi rentan terhadap tekanan ekonomi global. Ketergantungan ini membuat Indonesia tidak dapat sepenuhnya menutup diri dari ancaman yang datang dari kekuatan besar yang dapat memanfaatkan pengaruh ekonomi untuk mencapai tujuan geopolitik mereka.

C. Dampak Ancaman Hibrida

Ancaman hibrida di laut Indonesia dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap negara, antara lain:

1. Kedaulatan Tergerus

Pelanggaran wilayah yang dilakukan secara berulang tanpa respons tegas akan mengubah status quo wilayah maritim Indonesia. Hal ini dapat merusak kedaulatan Indonesia, membuat negara lain meragukan klaim teritorial Indonesia, dan mengarah pada konflik terbuka jika tidak segera ditangani dengan baik.

2. Kerugian Ekonomi

Praktik ilegal seperti illegal fishing, penyelundupan, dan sabotase terhadap infrastruktur pelabuhan dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang sangat besar. Menurut estimasi, kerugian akibat illegal fishing saja mencapai sekitar Rp 30 triliun per tahun, sementara kerugian dari penyelundupan dan sabotase logistik bisa mencapai angka yang lebih tinggi.

3. Eskalasi Geopolitik

Ketegangan maritim, seperti insiden di Laut Natuna Utara atau Laut Cina Selatan,

dapat dengan mudah memicu konflik terbuka. Seiring dengan meningkatnya ketegangan geopolitik, Indonesia harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam rivalitas antara kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok.

4. Disrupsi Stabilitas Nasional

Ancaman hibrida dapat menggerus legitimasi pemerintah di mata rakyat. Jika masyarakat pesisir merasa negara gagal melindungi laut mereka, potensi radikalisme sosial bisa meningkat. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan berkurang jika mereka merasa tidak terlindungi.

D. Diskusi Strategis

Menghadapi ancaman hibrida di laut, Indonesia perlu mengembangkan pendekatan pertahanan maritim yang lebih komprehensif, yang mengintegrasikan berbagai aspek kekuatan nasional. Beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan antara lain:

1. Membangun Pertahanan Hibrida Maritim

Integrasi TNI AL, Bakamla, dan KKP dalam satu komando terpadu akan mempermudah respons terhadap ancaman. Penggunaan teknologi canggih seperti AI, big data, dan satelit akan meningkatkan pemantauan wilayah perairan Indonesia secara real-time.

2. Diplomasi Maritim yang Proaktif

Indonesia harus memainkan peran aktif di forum internasional, membentuk narasi yang kuat terkait kedaulatan maritim Indonesia, serta memperkuat posisi di ASEAN untuk menghadapi taktik abu-abu negara besar seperti Tiongkok.

3. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

Masyarakat pesisir, terutama nelayan, harus dipandang sebagai bagian dari pertahanan maritim. Program edukasi bela negara dan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat pesisir akan membantu meningkatkan kesadaran mereka akan pentingnya menjaga kedaulatan laut.

4. Kemandirian Ekonomi Maritim

Indonesia harus mengurangi ketergantungan pada investasi asing di sektor maritim, dengan memperkuat BUMN maritim dan mengembangkan industri galangan kapal nasional untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian ekonomi maritim.

5. Keamanan Siber Maritim

Indonesia perlu memperkuat pertahanan siber maritim dengan membangun sistem perlindungan terhadap infrastruktur digital pelabuhan, navigasi, dan logistik nasional. Pendidikan dan pelatihan di bidang siber bagi aparat negara juga harus ditingkatkan.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Membangun keamanan maritim nasional di era globalisasi menghadapi tantangan yang tidak lagi sederhana. Jika dahulu ancaman laut identik dengan peperangan konvensional, kini ancaman hadir dalam bentuk hibrida: kombinasi antara operasi militer non-tradisional, penetrasi ekonomi, propaganda informasi, hingga kejahatan transnasional yang samar-samar.

Dalam konteks Indonesia, negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, ancaman hibrida di laut memiliki implikasi langsung terhadap kedaulatan, ekonomi, stabilitas politik, serta posisi geopolitik. Laut Natuna Utara menjadi bukti bagaimana taktik abu-abu (*gray zone tactics*) dapat secara perlahan menggerus klaim yurisdiksi kita, sementara kerentanan siber pelabuhan dan jalur logistik bisa melumpuhkan ekonomi tanpa satu pun peluru ditembakkan. Kelemahan kita masih terletak pada:

1. Fragmentasi kelembagaan antara TNI AL, Bakamla, KKP, Polair, dan instansi lain.
2. Keterbatasan teknologi pengawasan untuk menjaga 81 ribu km garis pantai.
3. Rendahnya kesadaran masyarakat pesisir sebagai garda depan pertahanan non-militer.
4. Ketergantungan pada investasi dan logistik global, yang rawan menjadi instrumen tekanan geopolitik.

Dampaknya tidak hanya berupa kerugian ekonomi akibat illegal fishing dan penyelundupan, tetapi juga potensi pergeseran status quo maritim yang merugikan posisi strategis Indonesia di Indo Pasifik. Dengan demikian, keamanan maritim nasional harus didefinisikan ulang. Ia bukan sekadar kehadiran kapal perang, tetapi mencakup dimensi diplomasi, ekonomi, siber, teknologi, dan pemberdayaan rakyat. Indonesia membutuhkan konsep hybrid maritime defense yang mampu menjawab kompleksitas ancaman era globalisasi.

B. Saran

Untuk memperkuat keamanan maritim nasional dalam menghadapi ancaman hibrida, beberapa langkah strategis perlu ditempuh:

1. Membangun Arsitektur Pertahanan Laut Terintegrasi
 - a) Membentuk komando terpadu maritim yang mengintegrasikan TNI AL, Bakamla, KKP, dan Polair.
 - b) Mengembangkan Maritime Command and Control Center berbasis teknologi satelit, AI, dan big data untuk memantau aktivitas di seluruh wilayah perairan.
2. Penguatan Diplomasi Maritim Proaktif
 - a) Indonesia harus aktif membentuk narasi global tentang legalitas kedaulatan maritimnya, khususnya di Laut Natuna Utara.
 - b) ASEAN perlu digerakkan sebagai blok diplomatik yang solid dalam menghadapi taktik abu-abu dari negara-negara besar.
3. Kemandirian Ekonomi dan Teknologi Maritim
 - a) Penguatan industri galangan kapal nasional, sistem radar, dan teknologi siber agar Indonesia tidak bergantung pada negara lain.
 - b) Selektif terhadap investasi asing di sektor pelabuhan dan logistik, memastikan tidak ada kontrol strategis yang berpindah tangan.
4. Keamanan Siber Maritim sebagai Pilar Baru Pertahanan
 - a) Membangun sistem pertahanan siber khusus maritim yang melindungi pelabuhan, navigasi, dan rantai pasok logistik nasional.
 - b) Meningkatkan kapasitas SDM siber di TNI, Polri, dan Kemenhub sebagai bagian dari "armada digital".
5. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir sebagai Lapisan Pertahanan Non-Militer
 - a) Nelayan dan masyarakat pesisir perlu diposisikan sebagai "mata dan telinga negara" dalam deteksi awal ancaman.
 - b) Program edukasi bela negara maritim dan insentif ekonomi harus diperkuat agar mereka merasa menjadi bagian dari pertahanan nasional.
6. Pendekatan Komprehensif: Hard Power dan Soft Power
 - a) Keamanan maritim tidak cukup dengan kapal perang, tetapi juga perlu soft power berupa diplomasi publik,

kampanye informasi, dan pembangunan narasi internasional.

- b) Indonesia harus tampil sebagai poros maritim dunia bukan hanya sebagai slogan, melainkan realitas strategis yang diakui dunia.

DAFTAR RUJUKAN

- ASEAN. (2019). *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP)*. Jakarta: ASEAN Secretariat.
- Bakamla RI. (2021). *Laporan Tahunan Keamanan Laut Indonesia*. Jakarta: Badan Keamanan Laut Republik Indonesia.
- Bateman, S. (2020). *Maritime Security in the Indo-Pacific: Challenges and Opportunities*. Routledge.
- Bueger, C. (2015). "Maritime Security and the International Politics of Ocean Governance." *Journal of International Relations and Development*, 18(3), 1-23.
- Buzan, B., & Wæver, O. (2003). *Regions and Powers: The Structure of International Security*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Conley, H., & Ruy, D. (2019). *Countering Coercion in Maritime Asia*. Washington: Center for Strategic and International Studies (CSIS).
- International Maritime Organization (IMO). (2022). *Reports on Maritime Cybersecurity and Threats to Ports*. London: IMO.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). (2022). *Laporan Illegal Fishing dan Potensi Kerugian Ekonomi Nasional*. Jakarta: KKP.
- Rahakundini Bakrie, C. (2014). *Poros Maritim Dunia: Jalan Indonesia Menjadi Kekuatan Maritim Global*. Jakarta: UI Press.
- Sukma, R. (2019). *Indonesia and the Indo-Pacific: Strategic Dilemmas and Opportunities*. CSIS Indonesia Policy Brief.
- Till, G. (2018). *Seapower: A Guide for the Twenty-First Century* (4th ed.). Routledge.
- United Nations. (1982). *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)*. New York: United Nations.
- TNI AL. (2020). *Laporan Keamanan Maritim Indonesia dan Penanganan Ancaman*

Hibrida. Jakarta: Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.

Womack, B. (2016). *China and the International System: Becoming a World Power*. Cambridge University Press.

Zhao, Z. (2020). "Gray Zone Tactics and Maritime Security in the South China Sea." *Asia Pacific Security Studies*, 3(1), 44-59.

Jane's Defence Weekly. (2022). "Maritime Security in the Indo-Pacific: Emerging Threats and Strategies." *Jane's Defence Weekly*, Vol. 58, Issue 6, pp. 47-49.

The Diplomat. (2021). "China's Hybrid Warfare in the South China Sea." *The Diplomat*, March 2021.

RSIS. (2021). "Hybrid Threats and Maritime Security in Southeast Asia." *RSIS Policy Report*, 28(2), 1-15.

Bakamla, RI. (2022). "Maritime Domain Awareness: The Key to Responding to Hybrid Maritime Threats." *Journal of Indonesian Maritime Affairs*, 11(2), 56-74.

CSIS. (2020). *Southeast Asia's Maritime Security: Challenges and Policy Responses*. Washington D.C.: Center for Strategic and International Studies.